

## BADAN USAHA MILIK DAERAH

2019

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 12, LD 2019/NO. 12, TLD NO. 257

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 12 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk memperkuat sistem ekonomi daerah melalui pengelolaan sektor-sektor strategis. Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian daerah, pelayanan umum, dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Badan Usaha Milik Daerah, mencakup aspek pendirian, sektor usaha, kelembagaan, manajemen, pengembangan, serta pembubaran.
  - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2011; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019.
  - Peraturan Daerah ini mengatur antara lain, kewenangan Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendirian, modal Badan Usaha Milik Daerah yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Badan Usaha Milik Daerah, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, perubahan bentuk hukum, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi dan privatisasi, kepailitan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah, evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2019 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2019;
  - Penjelasan 14 hlm